PERAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN SINJAI DALAM PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) LAPPA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alfira Jayanti
NPP. 33.0904
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: alfirajyntii26@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Karolina R.S. Wenggi, M.H.
Email: karolina@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *The Sinjai Regency Fisheries Office normatively holds six primary roles in the management of the Lappa Fish Auction (TPI Lappa), namely as a licensing facilitator, rule enforcer, transaction supervisor, sanction provider, infrastructure provider, and fishermen's development and empowerment agent. In practice, however, none of these six roles has been functioning as intended. One contributing factor is the transfer of authority over the Lappa Fish Landing Base (PPI Lappa) to the South Sulawesi Provincial Government, which was not accompanied by a Cooperation Agreement, thereby giving rise to overlapping authority in the field.* ***Purpose:*** *To describe the role of the Sinjai Regency Fisheries Office in managing the Lappa Fish Auction Place (TPI), and to identify the factors that influence that rolt.* ***Method:*** *This study employs a qualitative descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with informants from government, fishermen, fish traders, and community figures using purposive and snowball sampling, complemented by field observation and document analysis. Data analysis follows the Miles and Huberman model through data reduction, display, and conclusion drawing, with validity ensured through triangulation. The analytical framework applies Biddle and Thomas's Role Theory (1966) across four dimensions: Expectation, Norm, Behavior, and Evaluation and Sanction.* ***Result:*** *The research found that the role of the Sinjai Regency Fisheries Office in managing the Lappa Fish Auction Place (TPI) has not been functioning optimally across all six of its normative roles. The office is ineffective as a licensing facilitator, rule enforcer, transaction supervisor, sanction provider, infrastructure provider, and fishermen's empowerment agent. The primary inhibiting factors are the absence of a Cooperation Agreement between the regency and provincial governments, overlapping authority between central, provincial, and regency levels, and minimal provincial human resources on site—especially given that 75% of the 800 docking ships hold central government permits outside the regency's retribution reach. However, supporting factors include strong social capital with the fishing community and a proposed Regent Regulation on facility service fees. The study concludes that resolving regulatory and institutional coordination issues is the key to effective and sustainable TPI management..* ***Conclusion:*** *The research concludes that the Sinjai Regency Fisheries Office cannot fully perform its roles in managing the Lappa Fish Auction Place due to the unresolved transfer of*

authority under Law No. 23/2014 and the absence of a Cooperation Agreement between the regency and provincial governments. This legal vacuum has caused overlapping authority, weak supervision, and operational paralysis—where the regency has staff but no authority, and the province has authority but no personnel. Therefore, sustainable TPI management is impossible without a clear legal framework and a finalized Cooperation Agreement.

Keywords: *Fisheries Management; Fish Auction Place;Levies; Local Government Role;Retribution*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai secara normatif memiliki enam peran utama dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, yaitu sebagai fasilitator perizinan, penegak aturan, pengawas transaksi, pemberi sanksi, penyedia sarana prasarana, serta pembina dan pemberdaya nelayan. Namun demikian, keenam peran tersebut dalam praktiknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi kondisi ini adalah peralihan kewenangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lappa ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak disertai dengan Perjanjian Kerja Sama, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan di lapangan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi peran tersebut.. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan Role Theory oleh Biddle dan Thomas (1966) sebagai kerangka analisis. **Hasil/Temuan:** Penelitian menemukan bahwa peran Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa belum berjalan optimal di keenam peran normatifnya. Dinas tersebut tidak efektif sebagai fasilitator perizinan, penegak aturan, pengawas transaksi, pemberi sanksi, penyedia sarana prasarana, dan pembina pemberdayaan nelayan. Faktor penghambat utamanya adalah tidak adanya Perjanjian Kerja Sama antara pemerintah kabupaten dan provinsi, tumpang tindih kewenangan antara tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, serta minimnya sumber daya manusia provinsi di lapangan terutama mengingat 75% dari 800 kapal yang bersandar memiliki izin pemerintah pusat yang berada di luar jangkauan retribusi kabupaten. Namun, faktor pendukungnya meliputi modal sosial yang kuat dengan komunitas nelayan dan usulan Peraturan Bupati tentang tarif jasa pelayanan fasilitas. Penelitian menyimpulkan bahwa menyelesaikan masalah regulasi dan koordinasi kelembagaan adalah kunci untuk pengelolaan TPI yang efektif dan berkelanjutan. **Kesimpulan:** Penelitian menyimpulkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai tidak dapat menjalankan perannya secara penuh dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa karena belum terselesaikannya pengalihan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan tidak adanya Perjanjian Kerja Sama antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Kekosongan hukum ini telah menyebabkan tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengawasan, dan kelumpuhan operasional—di mana kabupaten memiliki staf tetapi tidak memiliki kewenangan, sementara provinsi memiliki kewenangan tetapi tidak memiliki personel. Oleh karena itu, pengelolaan TPI yang berkelanjutan tidak mungkin terwujud tanpa kerangka hukum yang jelas dan Perjanjian Kerja Sama yang diselesaikan.

Kata kunci: *Pengelolaan Perikanan;Tempat Pelelangan Ikan;Pungutan; Peran pemerintah Daerah;Retribusi*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, Dimana sektor perikanan menjadi salah satu pilar penting dalam Pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di daerah pesisir sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan sektor perikanan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan urusan perikanan di wilayah masing-masing.

Pemerintah daerah merupakan usaha untuk hidup Bersama secara baik dan benar dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama (Labolo., 2014). Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang memiliki potensi perikanan yang sangat siginifikan tercatat dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sinjai tahun 2023, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang kontribusi terbesar yaitu 41,99% dengan nilai mencapai Rp.6,78 triliun dari total PDRB yang mencapai Rp.14,79 triliun.

Salah satu infrastruktur perikanan yang paling strategis di kabupaten Sinjai adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa yang berlokasi di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara. TPI ini dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dan berfungsi sebagai pusat transaksi jual beli ikan melalui sistem lelang lisan, tempat bongkar muat hasil tangkapan, serta sarana pembinaan mutu ikan dan pengumpulan data statistik perikanan. Namun demikian, data volume pendaratan ikan di TPI Lappa menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai (2024), pada tahun 2018 volume pendaratan mencapai 7.272.352 kg, kemudian meningkat drastis pada tahun 2022 menjadi 11.596.711 kg, namun turun sangat signifikan pada tahun 2023 menjadi hanya 3.277.517 kg. Fluktuasi ini menunjukkan adanya ketidakstabilan produksi dan efektivitas manajemen yang perlu mendapat perhatian serius.

Secara normatif, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012, Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai memiliki peran utama dalam pengelolaan TPI Lappa, mencakup fungsi fasilitator, penegak aturan, pengawas transaksi, dan pembina nelayan . Namun demikian, dalam praktiknya peran tersebut belum berjalan optimal, yang berdampak pada realisasi retribusi TPI Lappa yang terus menurun. Penurunan ini mengindikasikan adanya kebocoran transaksi akibat banyaknya jual beli ikan di luar sistem pelelangan resmi .

Permasalahan utama yang menyebabkan hal ini adalah peralihan kewenangan atas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lappa ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya pengawasan di lapangan [2][5]. Kondisi inilah yang mendorong perlunya kajian mendalam mengenai peran Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai guna memperkuat tata kelola TPI yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil *(Research Gap)*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan mendasar antara peran normatif Dinas

Perikanan Kabupaten Sinjai dengan realitas di lapangan dalam pengelolaan TPI Lappa. Secara normatif, dinas memiliki enam peran utama, namun fakta menunjukkan realisasi retribusi turun dari 98,90% (2018) menjadi 62,59% (2023), nelayan harus ke Makassar untuk mengurus izin, pengawasan lemah, sanksi hanya persuasif, dan kapasitas cold storage terbatas.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengisi kesenjangan dari penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada retribusi (Andi Erwin, 2021), dampak ekonomi (Idham Hayyun, 2007), pemberdayaan masyarakat (Lakoy dkk, 2021), atau co-management (Yasser Arafat, 2022), tanpa mengkaji secara spesifik peran pemerintah daerah sebagai aktor kunci pengelola TPI. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan Teori Peran Biddle dan Thomas (1966) untuk menganalisis peran Dinas Perikanan secara komprehensif.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena menyangkut potensi tidak terkelolanya aset daerah bernilai strategis secara optimal apabila status hukum pengelolaan TPI Lappa terus dibiarkan dalam ketidakpastian. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai tahun 2026, total nilai aset yang tercatat di kawasan PPI dan TPI Lappa mencapai Rp15,74 miliar, mencakup bangunan TPI, dermaga, gedung kantor, menara pengawas, cold storage, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Tanpa adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang jelas antara Kabupaten Sinjai dan Provinsi Sulawesi Selatan, status pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset tersebut menjadi tidak jelas, sehingga berpotensi terjadi pembiayaan ganda, pembiaran kerusakan, atau bahkan ketidakefisienan pemanfaatan aset daerah di kemudian hari. Selain itu, urgensi lain terletak pada potensi terjadinya konflik sosial horizontal antara nelayan lokal dengan nelayan dari luar daerah atau pemodal besar yang semakin leluasa mengakses fasilitas TPI tanpa kontrol yang memadai. Minimnya pengawasan karena kekosongan petugas dari provinsi, sementara petugas kabupaten tidak memiliki kewenangan resmi, menciptakan ruang bagi praktik monopoli pembelian ikan, penentuan harga yang tidak adil, serta penangkapan ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, nelayan kecil sebagai kelompok paling rentan akan terus terpinggirkan, yang pada gilirannya dapat memicu ketegangan dan konflik di masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak untuk segera memberikan rekomendasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga solutif bagi penguatan koordinasi vertikal dan perlindungan sosial-ekonomi nelayan local.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, Andi Erwin (2021) tentang Tata Kelola Retribusi TPI Lappa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai. Hasilnya menunjukkan bahwa tata kelola retribusi sudah berjalan sesuai jalurnya, namun belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap PAD Kabupaten Sinjai. Kekurangan penelitian ini adalah hanya fokus pada aspek retribusi tanpa mengkaji peran kelembagaan Dinas Perikanan secara mendalam.

Kedua, Idham hayyun AR (2007) meneliti Pengaruh Keberadaan TPI Lappa Terhadap Ekonomi Masyarakat. Hasilnya menunjukkan adanya dampak ekonomi positif dari keberadaan TPI. Kelemahan penelitian ini adalah hanya terbatas pada dampak ekonomi dan tidak menganalisis peran pemerintah dalam pengelolaan TPI.

Ketiga, Lakoy, Goni, dan Tampongangoy (2021) mengkaji Kearifan Lokal Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan Di Kota Bitung. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal dan partisipasi masyarakat mampu meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya perikanan. Penelitian ini lebih menekankan pada peran masyarakat, bukan peran pemerintah daerah.

Keempat,Yasser Arafat (2022) mengkaji Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat Di Era Resentralisasi Kewenangan. Hasilnya menekankan pentingnya model *co-management* (pengelolaan kolaboratif) sebagai solusi atas resentralisasi. Penelitian ini bersifat makro dan normatif, tidak spesifik pada studi kasus TPI di daerah tertentu.

Kelima, Aji Baskoro dan Hofifah (2023) mengkaji Instabilitas Tata Kelola Kelautan dan Perikanan: Perizinan, Kewenangan, Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Pesisir. asilnya menunjukkan bahwa sentralisasi perizinan menimbulkan ketidakstabilan tata kelola dan berdampak pada masyarakat pesisir. Penelitian ini berfokus pada regulasi di tingkat nasional tanpa studi kasus empiris di TPI Lappa.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah *(novelty)* dalam penelitian ini adalah Penelitian ini memberikan kontribusi orisinal bagi pengembangan ilmu administrasi publik melalui aplikasi pertama Teori Peran (Role Theory) dari Biddle dan Thomas (1966) secara komprehensif dalam konteks pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Indonesia. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dominan menggunakan kerangka *Good Governance* (Andi Erwin, 2021), *Co-Management* (Yasser Arafat, 2022), atau ekonomi pembangunan (Idham Hayyun AR, 2007), penelitian ini mengoperasionalkan keempat dimensi peran secara simultan, yaitu Harapan (*Expectation*), Norma (*Norm*), Wujud Perilaku (*Behavior*), serta Penilaian dan Sanksi (*Evaluation and Sanction*). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kerangka analisis alternatif (alternative analytical framework) yang lebih holistik untuk mengkaji kinerja kelembagaan pemerintah daerah, yang dapat direplikasi tidak hanya pada sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga pada sektor-sektor pelayanan publik lainnya.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa Provinsi Sulawesi Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi peran tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara holistik fenomena peran Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa berdasarkan data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena mampu

menggambarkan secara sistematis fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta empiris (Sugiyono, 2022).

Penelitian dilaksanakan di TPI Lappa yang terletak di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, dimana peneliti melaksanakan penelitian untuk pengumpulan data pada bulan Agustus 2025 - Juni 2026. TPI Lappa dipilih sebagai lokus penelitian karena merupakan infrastruktur perikanan paling strategis di Kabupaten Sinjai yang menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi ribuan nelayan, selain itu TPI Lappa juga mengalami dampak langsung dari peralihan kewenangan berdasarkan UU No. 23/2014 yang tidak disertai Perjanjian Kerja Sama, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang penting untuk dikaji.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan *Event Beautiful* Malino serta kemampuan memberikan informasi yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2022). Informan kunci dalam penelitian ini adalah: (1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai, dipilih sebagai pemegang kebijakan tertinggi yang bertanggungjawab atas seluruh program pengelolaan TPI Lappa; (2) Kepala UPTD TPI Lappa, dipilih karena merupakan penanggung jawab teknis operasional sehari-hari yang paling memahami kondisi rill di lapangan; (3) Analis akuakultur , dipilih karena memiliki pemahaman teknis tentang perlaihan kewenangan P3D dan merupakan mantan pengawas perikanan; (4) Kepala Bidang Kenelayanan, dipilih karena bertanggung jawab atas program pemberdayaan nelayan (5) Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan, dipilih karena mengelola system Lelang dan retribusi ; (6) Nelayan dipilih sebagai perwakilan pengguna layanan dari sisi produsen ikan; (7) Pedagang Ikan, dipilih sebagai perwakilan pengguna layanan dari sisi pembeli; (8) Tokoh Masyarakat dipilih untuk mewakili perspektif Masyarakat luas yang terdampak keberadaan TPI.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1994; Sugiyono, 2022) yang terdiri atas tiga tahapan: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kerangka analisis menggunakan teori peran *(Role Theory)* oleh Bidlle dan Thomas 1966) yang mencakup empat dimensi utama: Harapan *(Expectation), Norma (Norm),* Wujud Perilaku *(Behavior),* Penilaian *(Evaluation)* dan Sanksi *(Sanction).* Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa Provinsi Sulawesi Selatan

Penelitian ini menganalisis peran Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa pasca peralihan kewenangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lappa ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Peran mengacu pada teori Biddle dan Thomas (1966) yang meliputi empat dimensi utama yaitu *Expectation, Norm, Behavior, Evaluation and Sanction.* Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai sejauh mana Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai mampu mengelola dengan baik Tempat Pelelanngan Ikan (TPI) Lappa.

3.1.1 *Expectation* (Harapan)

Pemerintah berharap TPI Lappa menjadi pusat transaksi ikan yang tertib dan memberikan manfaat ekonomi serta PAD, sementara nelayan berharap kemudahan perizinan dan bebas pungutan ganda. Namun, kedua harapan ini tidak terpenuhi. Nelayan harus menempuh perjalanan 5 jam ke Makassar untuk mengurus izin kapal, dan terjadi pungutan berlapis (PNBP pusat, retribusi provinsi, dan retribusi daerah) yang memberatkan nelayan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Pemerintah daerah berharap TPI Lappa menjadi pusat transaksi ikan yang tertib, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan serta sumber PAD. Namun, kondisi di lapangan mengungkapkan bahwa harapan ini tidak terpenuhi. Meskipun demikian, ketidakseimbangan kapasitas antara pemerintah dan pelaku UMKM masih menjadi tantangan dalam membangun kondisi awal yang optimal, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Rosyadi et al. (2020).

3.1.2 *Norm* (Norma)

Secara normatif, pengelolaan TPI Lappa telah memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu UU No. 45 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 8 Tahun 2010. Namun, implementasinya terhambat karena ketiadaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kabupaten Sinjai dan Provinsi Sulawesi Selatan pasca peralihan kewenangan PPI Lappa. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakpastian operasional di lapangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Ketiadaan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dan Pemeirntah Provinsi menghambat program pemberdayaan nelayan karena koordinasi dengan provinsi tidak jela yang diakibatkan karena proses peralihan P3D tidak tuntas.

3.1.3 *Behavior* (Wujud Perilaku)

Implementasi peran Dinas Perikanan di lapangan masih lemah. Sistem lelang berjalan tidak optimal karena banyak transaksi dilakukan di luar TPI. Pengawasan tidak efektif karena dari 800 kapal yang bersandar, 600 kapal (75%) berizin pusat sehingga di luar jangkauan retribusi daerah. Realisasi retribusi terus menurun hingga hanya 62,59% pada tahun 2023. Sebagai upaya adaptif, Dinas Perikanan mengajukan hibah ke provinsi sebanyak tiga kali (2022-2026) namun belum mendapat tanggapan, serta melakukan pendekatan dialog dengan nelayan dan punggawa kapal. Berdasarkan

hasil observasi dan wawancara, pengawasan yang tidak optimal disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dari pemerintah provinsi, realisasi retribusi seringkali tidak mencapai target karena volume trenasaksi yang masuk ke system Lelang tidak seanding dengan total ikan yang sebenanrya dibongkar.

3.1.4 *Evaluation* (Penilaian) *dan Sanction* (Sanksi)

Proses kolaborasi diukur dari indikator membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama (Ansell & Gash, 2007). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, proses kolaborasi dalam penyelenggaraan *Event Beautiful* Malino tergolong cukup baik, terlihat dari terbangunnya hubungan kepercayaan antaraktor melalui komunikasi yang konsisten dan transparan, tingginya komitmen *stakeholder* yang diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan penyelenggaraan, serta terbentuknya kesamaan tujuan antar pemangku kepentingan untuk mengembangkan pariwisata daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini selaras dengan Yasintha (2020) yang menemukan bahwa kepercayaan antaraktor merupakan prasyarat utama keberhasilan kolaborasi.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara peran normative yang diamanatkan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dengan realitas di lapangan. Befdasarkan teori peran Biddle dan Thomas (1966) yanag menganalisis empat dimensi yaitu harapan, norma, wujud perilaku, serta penilaian dan sanksi, seluruh dimensi tersebut menunjukkan ketidakefektifan dalam praktik pengelolaan TPI Lappa. Akar masalah utama yang teridentifikasi Adalah peralihan kewenangan Pelabuhan Perikanan Ikan (PPI) Lappa ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak disertai dengan perjanjian kerja sama.

Penelitian ini memberikan analisis yang lebih spesifik karena berfokus langsung pada konteks pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tingkat kabupaten pasca peralihan kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan mengukur peran pemerintah daerah menggunakan empat dimensi Teori Peran Biddle dan Thomas (1966) secara komprehensif. Hal ini berbeda dari kajian Andi Erwin (2021) yang lebih menekankan tata kelola retribusi TPI dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun Idham Hayyun AR (2007) yang fokus pada keberadaan TPI terhadap ekonomi masyarakat. Kekhasan temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pebgelolaan TPI tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pencapaian target retribusi secara kuantitatif, tetapi sangat bergantung pada kualitas koordinasi kelembagaan antara pemerintah kabupaten dan provinsi, kejelasan perjanjian kerja sama, serta pendekatan yang dibangun secara inklusif dan berkelanjutan bersama komunitas nelayan (Biddle & Thomas, 1966; Indrawasih, 2008)

Penelitian menemukan beberapa faktor utama yang mendukung dan menghambat bagaimana Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam mengelola TPI Lappa sebagaimana mestinya. Faktor pendukung meliputi: (1) Modal social yaitu kepercayaan dan kedekatan dengan komunitas nelayan (2) Efektivitas dalam penyaluran bantuan dan subsidi; dan (3) Fleksibilitas regulasi melalui skema jasa pelayanan fasilitas 7

Adapun faktor penghambat meliputi: (1) Belum adanya perjanjian kerja sama antara pemerintah kabupaten dan provinsi; (2) Tumpangtindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten serta dominasi pemerintah dengan pola hubungan *top-down* yang menghambat partisipasi setara bagi seluruh aktor (Emerson et al., 2012); (3) Minimnya sumber daya manusia oleh Pemerintah Provinsi serta (4) evaluasi dan pemberian sanksyang belum optimal karena mekanisme evaluasi pasca-*event* (proses lelang) belum dilakukan secara sistematis (Lubis et al., 2025), sehingga kendala yang muncul tidak segera teridentifikasi dan diselesaikan.

IV. KESIMPULAN

Implementasi peran Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa secara umum belum berjalan sebagaimana mestinya, ditinjau dari empat dimensi Teori Peran Biddle dan Thomas (1966), yaitu harapan *(Expectation),* norma *(norm),* wujud perilaku *(behavior*), serta penilaian dan sanksi *(evaluation and sanction*). Pemerintah daerah seharusnya berperan sebagai fasilitator utama yang membangun komunikasi, koordinasi, serta hubungan kerja sama berbasis kepercayaan dengan nelayan dan pemerintah provinsi, namun ketiadaan perjanjian kerja sama menyebabkan tumpang tindih kewenangan sehingga realisasi retribusi TPI Lappa menurun drastic dari 98,90% (2018) menjadi hanya 65,59% (2023)

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas pada analisis peran Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam pengelolaan TPI Lappa Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada konteks pengelolaan TPI atau daerah lain. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan akses informasi karena belum adanya perjanjian kerja sama, tidak menganalisis peran pemerintah provinsi secara mendalam. Penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif membuat hasil penelitian bergantung pada kondisi lapangan saat penelitian berlangsung (Sugiyono, 2022).

Arah Masa Depan Penelitian *(future work)*. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan kajian pada pengelolaan TPI di kabupaten atau provinsi lain yang menghadapi persoalan tumpeng tindih kewenangan pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penggunaaan pendekatan kuantitaif atau mixed methods dapat dilakukan untuk mengukur secara lebih tepat korelasi antara kejelasan perjanjian kerja sama dengan realisasi pendapatan asli daerah. Penelitian lanjutan juga disarankan menganalisis perspektif Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan serta menggunakan desain studi kasus longitudinal untuk mengamati dinamika pengelolaan TPI Lappa dalam siklus tahunan penuh.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh informan dan pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ashanti, E. A., Afifah, N., & Burhan, I. (2023). *Mekanisme dan efektivitas pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai*. *Jurnal Pabean, 5*(2), 425–440. https://doi.org/10.61141/pabean.v5i2.425

Dahuri, R. (2024). *Strategi pembangunan ekonomi kelautan Indonesia*. *Jurnal Maritim Indonesia*. https://doi.org/10.31093/jmi.v12i1.123

Hanafi, M., & Rahman, A. (2022). *Dampak implementasi UU No. 23 Tahun 2014 terhadap pengelolaan pelabuhan perikanan di daerah*. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 14*(1). https://doi.org/10.15578/jkpi.v14i1.10921

Rijal, S., & Akob, M. (2023). *Analisis sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Sinjai*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 11*(1). https://doi.org/10.24252/jep.v11i1.35210

Syamsuddin, S. (2021). *Manajemen tempat pelelangan ikan (TPI) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sinjai*. *Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik, 9*(2), 74–88. https://doi.org/10.47030/aq.v9i2.74

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *22*(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Lubis, S., Hardianti, & Ahmad, R. M. (2025). E-government quality and organizational readiness as drivers of public service efficiency. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 15*(2), 212–223. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v15i2.5969

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Rosalia, F., Makhya, S., & Budiono, P. (2023). Pentahelix model in the development of village-owned enterprises (BUMDes) in Sidomulyo District South Lampung Regency Lampung Province. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 13*(2), 200–210. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i2.3660

Rosyadi, S., Kusuma, A. S., Fitrah, E., Haryanto, A., & Adawiyah, W. (2020). The multi-stakeholder's role in an integrated mentoring model for SMEs in the creative economy sector. *SAGE Open*, *10*(4). https://doi.org/10.1177/2158244020963604

Santoso, E. B., et al. (2023). Pengembangan obyek wisata Nagari Tuo Pariangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(2), 178–199. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i2.3763

Sentanu, I. G. E. P. S., Haryono, B. S., Zamrudi, Z., & Praharjo, A. (2023). Challenges and successes in collaborative tourism governance: A systematic literature review. *European Journal of Tourism Research*, 33, 1–29. https://doi.org/10.54055/ejtr.v33i.2669

Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration processes: Inside the black box. *Public Administration Review*, *66*(s1), 20–32. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x